



Faktor Makroekonomi dan Mikroekonomi dalam Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah di Indonesia

Tri Wahyuni¹, Pani Akhiruddin Siregar², Kadri Bancin³

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk menguji pengaruh faktor makroekonomi dan mikroekonomi dalam pembiayaan bermasalah Bank Syariah di Indonesia. Indikator faktor makroekonomi dan mikroekonomi meliputi Inflasi, BI Rate, CAR dan FDR. Adapun indikator pembiayaan bermasalah Bank Syariah di Indonesia adalah NPF. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier berganda. Data yang digunakan data sekunder bulanan dari Laporan Keuangan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang dipublikasikan Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia serta Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan Indonesia lewat Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (SPS-BI/OJK) periode Januari 2006 hingga Juli 2016. Hasil penelitian sebagai berikut: (1) Model estimasi menunjukkan nilai R Square-nya sebesar 0,319 yang mewakili nilai koefisien determinasi. Hal ini bermakna 31,90% dari variasi variabel NPF mampu dijelaskan oleh variabel bebas dalam model ini. Sedangkan sisanya sebesar 68,10% dijelaskan oleh sebab-sebab lain yang tidak masuk dalam model; (2) Model regresi pada variabel bebas secara simultan mempengaruhi variabel terikat, sehingga model regresi variabel bebas bisa dipakai untuk memprediksi variabel terikat; dan (3) Inflasi dan BI Rate berpengaruh terhadap NPF, akan tetapi CAR dan FDR tidak berpengaruh terhadap NPF

Kata Kunci: Inflasi; BI Rate; CAR; FDR; NPF.

Abstract

Research aims to test the influence of macroeconomic and microeconomic factors in the problem financing of Sharia Bank in Indonesia. The indicators of macroeconomic and microeconomic factors are inflation, BI Rate, CAR and FDR. The indicators

¹ STAI Panca Budi Perdagangan, Simalungun

² STAI Panca Budi Perdagangan, Simalungun

³ STAI Panca Budi Perdagangan, Simalungun

E-mail : ¹triwahyuni874@yahoo.com, ²siregarpaniakhiruddin@yahoo.co.id,

³kadribancin15@gmail.com



of problematic financing of Sharia Bank in Indonesia is NPF. The research method uses a quantitative approach with multiple linear regression analysis techniques. Data used secondary data in the form of a monthly data From The Financial Report of Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit published by Sharia Banking Directorate, Bank Indonesia and the Bank Licensing and Banking Information Department, Indonesia Financial Services Authority through Sharia Banking Statistics Bank Indonesia/Indonesia Financial Services Authority from January 2006 to Juli 2016. The following research results: (1) The model estimate shows its R Square value of 0,319 representing the value of coefficient of determination. This means that 31,90% of the variable variations of the NPF are capable of being described by free variables in this model. The remaining 68,10% is explained by other reasons that do not fit into the model; (2) A regression model on the independent variable simultaneously affects the dependent variable, so that the independent variable regression model can be used to predict the dependent variable; and (3) Inflation and BI Rate significantly influence on NPF, but CAR and FDR have no impact on NPF

Keywords: Inflation; BI Rate; CAR; FDR; NPF.

PENDAHULUAN

Sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi dan gerak pembangunan suatu bangsa, lembaga keuangan tumbuh dengan berbagai alternatif jasa yang ditawarkan. Lembaga keuangan yang merupakan lembaga perantara dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*), memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*) (Sinungan, 1987: 111). Lembaga keuangan sebagaimana halnya suatu lembaga atau institusi pada hakikatnya berada di tengah-tengah masyarakat. Lembaga yang merupakan organ masyarakat merupakan sesuatu yang keberadaannya untuk memenuhi tugas sosial dan kebutuhan khusus masyarakat. Berbagai jenis lembaga ada dan dikenal dalam masyarakat masing-masing mempunyai tugas sendiri sesuai dengan maksud dan tujuan dari tiap lembaga yang bersangkutan (Hartono, 2001: 4) terutama bank.

Bank sebagaimana lembaga keuangan lainnya dan perusahaan pastinya memiliki motif untuk memperoleh hasil usaha yang selalu dihadapkan dengan risiko yang dikenal dengan istilah risiko kredit. Sebab, risiko yang terjadi dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi bank sekiranya risiko ini tidak dapat dideteksi dan dikelola dengan semestinya. Risiko kredit adalah risiko dari



kemungkinan terjadinya kerugian bank sebagai akibat tidak dilunasinya kembali kredit yang diberikan bank kepada debitur maupun *counterparty* lainnya (Ali, 2006: 27). Risiko kredit atau disebut kredit bermasalah dikenal dengan *Non Performing Loan* (NPL) dalam Bank Konvensional dan *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Syariah dapat diukur dari kolektibilitasnya. Kolektibilitasnya merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga. Penilaian kolektibilitas kredit digolongkan ke dalam 5 (lima) kelompok, yakni lancar (*pass*), dalam perhatian khusus (*special mention*), kurang lancar (*substandard*), diragukan (*doubtful*) dan macet (*loss*). Jika kredit dikaitkan dengan tingkat kolektibilitasnya, maka yang digolongkan kredit bermasalah adalah kredit yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet (Siamat, 2005: 358).

Penyebab pembiayaan bermasalah (NPF) pada Bank Syariah dipengaruhi dari sisi eksternal dan sisi internal. Pengaruh sisi eksternal meliputi faktor makroekonomi yang terbentuk atas kebijakan moneter dan kebijakan fiskal secara makro oleh pemerintah negara, seperti Inflasi dan BI Rate. Pengaruh sisi internalnya merupakan pengaruh faktor mikroekonomi bank yang berasal dari kegiatan operasional di dalam bank itu sendiri yang tertuang dalam kinerja keuangan. Kinerja keuangan suatu perbankan dapat dilihat melalui rasio keuangannya sebagai indikator kesehatan serta sebagai alat analisis untuk memprediksi keuntungan yang akan dihasilkan, seperti *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

Jika pembiayaan yang disalurkan bank banyak yang bermasalah (macet), maka tentunya bank akan sangat menderita. Pertama, pendapatan margin menurun. Kedua, laba menurun. Ketiga, mengganggu likuiditas bank. Keempat, reputasi bank rusak. Kelima, alokasi sumber daya manusia (SDM). Keenam, alokasi waktu (Jusuf, 2014: 317). Besarnya NPF yang baik di bawah 5 persen. Jika nilai NPF di atas 5 persen, maka dapat dikatakan tidak sehat. Jika semakin tinggi rasio NPF, maka akan semakin buruk kualitas pembiayaan bank yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah Bank Syariah semakin besar, sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah pun semakin besar. Pembiayaan yang dimaksud dalam hal ini adalah pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk pembiayaan kepada bank lain. Berdasarkan

uraian, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh faktor makroekonomi dan mikroekonomi dalam pembiayaan bermasalah Bank Syariah di Indonesia

KAJIAN LITERATUR

Bank Syariah

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Perbedaan mendasar antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional adalah sistem yang digunakan. Dengan tidak menggunakan sistem bunga terbukti di saat terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997, Bank Syariah tetap kokoh dan tidak terpengaruh oleh krisis dan terbukti betapa besar efek negatif yang ditimbulkan oleh sistem bunga Bank Konvensional, sehingga memporak porandakan hampir semua aspek perekonomian dan sosial politik negara akibat penerapannya terhadap inflasi, investasi, produksi, pengangguran dan kemiskinan (Machmud dan Rukmana, 2010: 6). Sama halnya dengan Bank Konvensional, Bank Syariah menjalankan peranannya selaku perantara keuangan yang bermakna Bank Syariah menjalankan dua fungsi utama bank, yakni menghimpun dana masyarakat dan memberikan kredit/pembiayaan (Muhammad, 2004: 42). Portofolio pembiayaan (*financing*) merupakan bagian terbesar dari aktiva bank karena pembiayaan merupakan aktifitas utama dari usaha Bank Syariah. Dengan demikian, pendapatan bagi hasil atau keuntungan jual beli yang merupakan instrumen pembiayaan Bank Syariah merupakan sumber pendapatan yang dominan (Arifin, 2009: 243).

Inflasi

Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang secara terus menerus (Nopirin, 2009: 25). Secara umum, inflasi berarti kenaikan tingkat harga



secara umum dari barang/komoditas dan jasa selama suatu periode waktu tertentu. Inflasi dapat dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit perhitungan moneter terhadap suatu komoditas. Definisi inflasi oleh para ekonom modern adalah kenaikan yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus dibayar (nilai unit penghitungan moneter) terhadap barang-barang/komoditas dan jasa. Sebaliknya, jika yang terjadi adalah penurunan nilai unit penghitungan moneter terhadap barang-barang/komoditas dan jasa, maka didefinisikan sebagai deflasi (Karim, 2011: 135).

BI Rate

Nama lain dari BI Rate adalah tingkat suku bunga oleh Bank Indonesia. Bunga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar oleh bank dan atau nasabah sebagai balas jasa atas transaksi antara bank dan nasabah. Harga merupakan sejumlah uang yang diterima oleh penjual untuk barang atau jasa ditempat produksi atau di dalam aktivitas usaha. Suku bunga adalah harga yang harus dibayar kalau terjadi pertukaran antara satu rupiah sekarang dan satu rupiah nanti (Boediono, 1996: 76).

Bank Indonesia melakukan penguatan kerangka operasi moneter dengan mengimplementasikan suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan baru yaitu BI 7-Day (Reverse) Repo Rate yang berlaku efektif sejak 19 Agustus 2016 menggantikan BI Rate. Penguatan kerangka operasi moneter ini merupakan hal yang lazim dilakukan di berbagai Bank Sentral dan merupakan *Best Practice Internasional* dalam pelaksanaan operasi moneter. Kerangka operasi moneter senantiasa disempurnakan untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan. Instrumen BI 7-Day (Reverse) Repo Rate digunakan sebagai suku bunga kebijakan baru karena dapat secara cepat mempengaruhi pasar uang, perbankan dan sektor riil. Instrumen BI 7-Day Repo Rate sebagai acuan yang baru memiliki hubungan yang lebih kuat ke suku bunga pasar uang, sifatnya transaksional atau diperdagangkan di pasar dan mendorong pendalaman pasar keuangan, khususnya penggunaan instrumen repo. Dengan penggunaan instrumen BI 7-Day (Reverse) Repo Rate sebagai suku bunga kebijakan baru, terdapat 3 (tiga) dampak utama yang diharapkan. Pertama, menguatnya sinyal kebijakan moneter dengan suku bunga (Reverse) Repo Rate 7 hari sebagai acuan utama di pasar keuangan. Kedua, meningkatnya efektivitas

transmisi kebijakan moneter melalui pengaruhnya pada pergerakan suku bunga pasar uang dan suku bunga perbankan. Ketiga, terbentuknya pasar keuangan yang lebih dalam, khususnya transaksi dan pembentukan struktur suku bunga di pasar uang antarbank (PUAB) untuk tenor 3-12 bulan.

Analisis Rasio Keuangan

Setiap bank, baik Bank Konvensional maupun Bank Syariah diwajibkan untuk menyajikan dan mempublikasikan laporan keuangan. Salah satu tujuan dari diwajibkannya hal tersebut adalah agar masyarakat umum dapat melihat kinerja bank yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank untuk menyimpan dananya sangat dipengaruhi oleh kinerja (*performance*) bank yang bersangkutan. Hal tersebut dapat dilihat dari posisi keuangan, melalui neraca dan perhitungan laba/rugi dengan cara membandingkannya dengan neraca atau perhitungan laba/rugi bank lain atau dengan membandingkan neraca bank tersebut, untuk waktu atau tahun yang berbeda (Firdaus, 2001: 29).

Analisis rasio keuangan sendiri dimulai dengan laporan keuangan dasar, yakni dari neraca (*balance sheet*), perhitungan rugi laba (*income statement*) dan laporan arus kas (*cash flow statement*). Perhitungan rasio keuangan akan lebih jelas sekiranya dihubungkan dengan menggunakan pola historis bank tersebut. Yang dilihat perhitungan pada sejumlah tahun untuk menentukan apakah bank membaik atau memburuk atau melakukan perbandingan dengan bank lain dalam industri yang sama (Fahmi, 2016: 50).

Capital Adequacy Ratio (CAR)

Rasio CAR merupakan bahagian dari modal yang dijadikan alat ukur kesanggupan bank membangun kepercayaan masyarakat, sehingga bank dapat menarik dana pihak ketiga (DPK). CAR juga memperlihatkan seberapa besar aktiva bank yang mengandung risiko, seperti pembiayaan, penyertaan, surat berharga dan tagihan pada bank lain dapat dibiayai dari modal sendiri di samping memperoleh dana dari sumber-sumber di luar bank (Margaretha, 2007: 63) atau CAR adalah kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam memperhatikan modal yang mencukupi kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi dan mengontrol risiko-risiko



yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank (Kuncoro dan Suhardjono, 2011: 519).

Financing to Deposit Ratio (FDR)

FDR adalah rasio untuk mengukur likuiditas bank dari perbandingan antara pembiayaan yang diberikan dengan dana yang diterima (Taswan, 2010: 245). Rasio FDR ini juga dipergunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut, sehingga jika semakin tinggi angka FDR suatu bank, maka berarti digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibanding dengan bank yang mempunyai angka rasio lebih kecil (Muhammad, 2005: 55).

Non Performing Financing (NPF)

Di setiap menjalankan bisnis perbankan yang penuh dengan risiko, Bank Syariah juga tidak terlepas dari risiko pembiayaan bermasalah, sehingga Bank Syariah perlu mengatur strategi agar tingkat NPF-nya tidak dalam kondisi yang mengkhawatirkan (Antonio, 2001: 107). Oleh karenanya, Bank Syariah perlu tetap mengelola eksposur risiko pembiayaan pada tingkat yang memadai, sehingga dapat meminimalkan potensi kerugian dari penyediaan dana. Sebab, kondisi aset suatu perbankan masih tetap dipengaruhi oleh risiko pembiayaan yang jika tidak dikelola secara efektif, maka akan mengganggu kelangsungan usaha bank (Hariyani, 2010: 5). Namun, selalu ada *opportunity cost* yang membuntuti setiap pilihan yang diambil, sehingga Bank Syariah dapat mengkonversi risiko menjadi peluang bisnis yang menguntungkan (Wahyudi et al., 2013: 33).

METODE PENELITIAN

Populasi (*population*) acapkali dinamakan universum (*universe*). Populasi sedemikian merupakan keseluruhan dari unsur-unsur yang memiliki satu atau beberapa ciri atau karakteristik yang sama karena umumnya, penelitian terhadap populasi dilakukan dengan jalan melakukan observasi atau pengukuran terhadap sebagian dari keseluruhan populasi (Dajan: 1986, 110). Adapun sebagian yang diambil dari populasi disebut sampel (Sudjana, 2014: 6) atau sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan dapat mewakili populasi penelitian (Kuncoro, 2009: 122).



Populasi penelitian diperoleh dari Laporan Keuangan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang dipublikasikan Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia serta Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia lewat Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan (SPS-BI/OJK) melalui situs resminya di www.bi.go.id. dan www.ojk.go.id. Data sekundernya berupa data runtun waktu (*time series*) bulanan periode Januari 2006 hingga Juli 2016, sehingga diperoleh sampel sebanyak 127 unit analisis.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan dengan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier berganda yang dinyatakan dengan angka-angka dan perhitungannya menggunakan metode statistik yang dibantu dengan Program Statistical Product dan Service Solutions (SPSS).

Analisis regresi berganda digunakan peneliti sekiranya peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel terikat. Analisis regresi berganda pun dilakukan sekiranya jumlah variabel bebas minimal dua variabel (Sugiyono dan Susanto, 2015: 303).

Model persamaan analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + \epsilon \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

Y	Pembiayaan bermasalah (NPF) Bank Syariah di Indonesia	X ₁	Inflasi
	Konstanta(<i>intercept</i>)	X ₂	BI Rate
	Koefisien regresi	X ₃	CAR
		X ₄	FDR
a		ε	Standar eror
b ₁ ,b ₂ ,b ₃ ,b ₄			

Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain,



sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2013: 244).

Tahapan analisis data penelitian dijelaskan dengan uji statistik dan uji arti ekonomi:

1. Uji Ketepatan Letak Koefisien Determinasi R Square
Koefisien determinasi R Square (R^2) mengukur besarnya kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan variasi dari variabel terikat (Ghozali, 2013: 97).
2. Uji F (Uji Simultan)
Suatu metode analisis statistik untuk menguji kesamaan atau lebih dari dua rata-rata populasi dinamakan analisis varians (ANOVA). Pengujian ini menggunakan distribusi F dan pengujian dilakukan searah atas (Mulyono, 2017: 186). Uji F sering disebut dengan pengujian signifikansi keseluruhan terhadap garis regresi yang ingin menguji apakah Y (variabel terikat) secara linier berhubungan dengan variabel X (variabel bebas). Uji F bertujuan untuk mengidentifikasi apakah garis regresi dapat digunakan sebagai penaksir.
3. Uji t (Uji Parsial)
Uji t mengasumsikan berbagai variabel pada populasi dari mana sampel ditarik terdistribusi secara normal. Pengujian dengan uji t juga memiliki asumsi bahwa distribusi memiliki varians yang homogen yang bermakna penyimpangan setiap nilai atau skor adalah sama dari nilai rata-ratanya. Dengan demikian, penggunaan uji t tergantung pada masalah dan situasi penelitian yang tengah dihadapi (Morissan, 2015: 330-331). Hasil uji t inilah hasil analisis regresi linier berganda.
4. Uji Arti Ekonomi
Kriteria ini ditentukan oleh prinsip teori ekonomi dan mengacu pada tanda dan ukuran parameter dari hubungan ekonomi. Jika hasil estimasi berkonfrontasi dengan teori ekonomi, maka hasilnya harus ditolak, kecuali dengan alasan kuat untuk menyatakan bahwa khusus kasus ini prinsip-prinsip ekonomi tidak berlaku. Secara umum, jika kriteria uji arti ekonomi tidak dipenuhi, maka hasil estimasi menjadi tidak memuaskan (*unsatisfactory*).

PEMBAHASAN

Berikut ini adalah hasil pengujian model regresi berganda untuk menguji pengaruh faktor makroekonomi dan mikroekonomi terhadap pembiayaan bermasalah bank syariah di Indonesia, sebagai berikut:



Uji Ketepatan Letak Koefisien Determinasi R Square

Berdasarkan Tabel 1 nilai R sebesar 0,565 sebagai nilai korelasi berganda yang bermakna variabel bebas memiliki keeratan hubungan dengan variabel terikat. Sedangkan nilai R Square sebesar 0,319 yang mewakili nilai koefisien determinasi. Hal ini bermakna 31,90% dari variasi variabel NPF mampu dijelaskan oleh variabel bebas dalam model ini. Sedangkan sisanya sebesar 68,10% dijelaskan oleh sebab-sebab lain yang tidak masuk dalam model.

Uji F (Uji Simultan)

Analisis dan kesimpulan dari Tabel 1 di bawah adalah H_0 tidak dapat diterima (ditolak) dan H_a dapat diterima (tidak dapat ditolak). Sebab, F_{hitung} sebesar 14,268 lebih besar dari F_{tabel} sebesar 2,45 dan nilai Sig. sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini bermakna model regresi pada variabel bebas secara simultan mempengaruhi variabel terikat, sehingga model regresi variabel bebas bisa dipakai untuk memprediksi variabel terikat.

Uji t (Uji Parsial)

Sedangkan hasil uji partial (t) pada ringkasan uji regresi pada tabel 1 adalah:

1. Variabel INFLASI mempunyai nilai t_{hitung} sebesar 4,127 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,980 atau nilai Sig. sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang bermakna H_0 ditolak dan H_a diterima. Dari arah hubungan, variabel INFLASI memiliki arah hubungan yang negatif terhadap variabel NPF. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel INFLASI berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel NPF.
2. Variabel BI RATE mempunyai nilai t_{hitung} sebesar 6,953 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,980 atau nilai Sig. sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang bermakna H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel BI RATE berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel NPF.
3. Variabel CAR mempunyai nilai t_{hitung} sebesar 0,573 lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 1,980 atau nilai Sig. sebesar 0,567 lebih besar dari 0,05 yang bermakna H_0 diterima dan H_a ditolak. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel CAR tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel NPF.



4. Variabel FDR mempunyai nilai t_{hitung} sebesar 1,567 lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 1,980 atau nilai Sig. sebesar 0,120 lebih besar dari 0,05 yang bermakna H_0 diterima dan H_a ditolak. Dari arah hubungan, variabel FDR memiliki arah hubungan yang negatif terhadap variabel NPF. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel FDR tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel NPF.

Dengan melihat hasil uji t , interpretasi dari persamaan regresi linier berganda ini adalah:

$$NPF = 1,651 - 0,278 \text{ INFLASI} + 0,865 \text{ BI RATE} + 0,044 \text{ CAR} - 0,028 \text{ FDR} + \varepsilon$$

Tabel 1: Ringkasan Uji Regresi

Tabel 1
Ringkasan Uji Regresi

Model	B	t	Sig
Konstanta	1,651	0,804	0,423
INFLASI	-0,278	-4,127	0,000
BI RATE	0,865	6,953	0,000
CAR	0,044	0,573	0,567
FDR	-0,028	-1,567	0,120

F=14.268; Sig=0,000
R=0,565; R²=0,319

1. Konstanta 1,651 menunjukkan jika variabel INFLASI, variabel BI RATE, variabel CAR dan variabel FDR konstan, maka variabel NPF sebesar 1,651 yang bermakna Bank Syariah mengalami keuntungan sebesar 1,651%. Perbankan merupakan sarana yang strategis dalam rangka pembangunan ekonomi. Peran yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Dalam Bank Syariah, hubungan antara bank dengan nasabah adalah kemitraan antara penyandang dana dengan pengelola dana. Berbeda dengan Bank Konvensional, Bank Syariah dalam operasionalnya meniadakan sistem bunga. Sebagai gantinya, Bank Syariah menggunakan beberapa sistem yang didasarkan pada prinsip syariah, seperti sistem bagi hasil, sistem jual beli, sistem sewa, sistem gadai dan lain-lainnya. Hal ini amat penting agar Bank Syariah dapat menunjukkan ciri khasnya sendiri dari yang dimiliki

Bank Konvensional.

2. Angka pada koefisien regresi variabel INFLASI sebesar -0,278 memberikan makna bahwa dengan menurunnya inflasi sebesar 1% cenderung sensitif dalam mengurangi atau menekan rasio pembiayaan bermasalah Bank Syariah sebesar 0,278%. Hal ini menunjukkan, pada umumnya inflasi menyebabkan harga-harga barang meningkat. Salah satu penurunan risiko yang dihadapi industri Bank Syariah adalah menurunnya risiko pembiayaan bermasalah yang sering disebut NPF.
3. Angka pada koefisien regresi variabel BI RATE sebesar 0,865 memberikan makna bahwa dengan meningkatnya BI Rate sebesar 1% tentunya pembiayaan bermasalah atau NPF semakin meningkat karena dengan meningkatnya BI Rate akan melemahkan kemampuan nasabah untuk mengembalikan pembiayaannya sebesar 0,865%. Dengan kata lain, hal ini menunjukkan dengan peningkatan BI Rate diharapkan produk pembiayaan Bank Syariah semakin kompetitif.
4. Angka pada koefisien regresi variabel CAR sebesar 0,044 memberikan makna bahwa dengan meningkatnya kecukupan modal sebesar 1% tentunya Bank Syariah akan meningkatkan penyaluran pembiayaannya sebesar 0,044%. Hal ini menunjukkan Bank Syariah yang memiliki kecukupan modal tentunya pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah akan berkurang karena risiko yang terjadi sebelumnya sudah diperkirakan.
5. Angka pada koefisien regresi variabel FDR sebesar -0,028 memberikan makna bahwa dengan menurunnya rasio FDR sebesar 1% tentunya Bank Syariah akan menurunkan jumlah pembiayaan yang diberikan sebesar 0,028%. Hal ini menunjukkan pada saat jumlah pembiayaan yang diberikan dan rasio FDR rendah, ada kemungkinan laba yang diperoleh pun rendah.

Uji Arti Ekonomi

Pengaruh Variabel Inflasi Terhadap Variabel NPF

Variabel INFLASI, yakni inflasi merupakan gejala ekonomi yang menjadi perhatian berbagai pihak tidak hanya masyarakat umum. Tetapi, juga menjadi perhatian dunia usaha, Bank Indonesia dan pemerintah. Risiko keuangan juga muncul dikarenakan adanya inflasi.



Berdasarkan angka pada koefisien regresi variabel INFLASI sebesar -0,278 memberikan makna dengan menurunnya inflasi sebesar 1% cenderung sensitif dalam mengurangi atau menekan rasio pembiayaan bermasalah perbankan syariah sebesar 0,278% dan nilai Sig. sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05.

Inflasi akan mempengaruhi kegiatan ekonomi baik secara makro maupun mikro termasuk kegiatan investasi. Hal ini berkemungkinan berdampak terhadap perekonomian yang menjadi lesu karena daya beli masyarakat akan menurun serta bisnis pun akan melemah. Nasabah sebagai peminjam dana akan cenderung kesulitan mengembalikan dana kepada bank. Pada saat terjadinya inflasi, beban tanggungan nasabah akan semakin tinggi. Akan tetapi, pendapatan recara rill cenderung tetap atau bahkan menurun dengan catatan sesuai ceteris paribus.

Pengaruh Variabel BI RATE Terhadap Variabel NPF

Variabel BI RATE, yakni BI Rate dalam Bank Syariah sebagai pembanding. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain dalam perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI Rate sekiranya inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan. Sebaliknya, Bank Indonesia akan menurunkan BI Rate sekiranya inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan angka pada koefisien regresi variabel BI RATE sebesar 0,865 dan nilai Sig. sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 memberikan makna dengan meningkatnya BI Rate sebesar 1% tentunya pembiayaan bermasalah yang disebut NPF semakin meningkat karena dengan meningkatnya BI Rate akan melemahkan kemampuan nasabah untuk mengembalikan pembiayaannya sebesar 0,865%. Namun, pada kenyataannya, peningkatan BI Rate tidak selalu diikuti adanya peningkatan permintaan pembiayaan Bank Syariah. Hal ini tentunya berakibat nasabah cenderung memilih opsi lain, yakni melakukan pinjaman atau pembiayaan pada Bank Syariah yang biaya dananya dianggap lebih rendah. Oleh karenanya, sudah sepantasnya menjadi perhatian khusus setiap Bank Syariah agar dapat meminimalisir terjadinya peningkatan rasio NPF dengan catatan sesuai ceteris paribus.

Pengaruh Variabel CAR Terhadap Variabel NPF

Variabel CAR, yakni rasio perbandingan jumlah modal baik modal inti maupun modal pelengkap terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Kecukupan modal merupakan faktor yang sangat penting bagi bank dalam rangka menampung risiko kerugian terutama risiko kerugian atas tidak dibayarkannya kembali pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah.

Berdasarkan angka pada koefisien regresi variabel CAR sebesar 0,044 dan nilai Sig. sebesar 0,567 lebih besar dari 0,05 memberikan makna dengan meningkatnya kecukupan modal sebesar 1% tentunya Bank Syariah akan meningkatkan penyaluran pembiayaannya sebesar 0,044%. Dengan demikian, potensi kerugian yang dialami oleh bank akan ditanggulangi sekiranya bank memiliki rasio kecukupan modal yang baik. Oleh karenanya, besarnya kecukupan modal suatu bank akan berpengaruh pada mampu atau tidaknya suatu bank secara efisien menjalankan kegiatannya dan dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat (khususnya untuk peminjam) terhadap kinerja bank yang berarti permodalan Bank Syariah yang diwakilkan rasio CAR harus mampu menutupi seluruh risiko usaha yang dihadapi oleh bank termasuk risiko kerugian akibat terjadinya pembiayaan bermasalah dengan catatan sesuai ceteris paribus.

Pengaruh Variabel FDR Terhadap Variabel NPF

Variabel FDR, yakni rasio perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan DPK dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari DPK. Peningkatan DPK tanpa diimbangi peningkatan pembiayaan akan mengurangi bagi hasil yang diterima nasabah. FDR hanya menggambarkan sebaik-baiknya bank dalam memanfaatkan dana yang dihimpun dari masyarakat yang berupa penyaluran pembiayaan agar mendapat keuntungan yang kemudian menjadi kewajiban jangka pendek bank untuk mengembalikannya kembali ke nasabah yang sewaktu-waktu mengambil dananya kembali. Rasio FDR juga merupakan indikator untuk mengetahui kerawanan suatu bank dalam menilai faktor likuiditas. Sulitnya pengelolaan likuiditas disebabkan dana yang dikelola bank sebagian besar adalah dana masyarakat yang bersifat jangka pendek dan dapat ditarik sewaktu-waktu.



Berdasarkan angka pada koefisien regresi variabel FDR sebesar $-0,028$ memberikan makna dengan menurunnya rasio FDR sebesar 1% tentunya Bank Syariah akan menurunkan jumlah pembiayaan yang diberikan sebesar $0,028\%$ dan nilai Sig. sebesar $0,120$ lebih besar dari $0,05$. Dengan demikian, sedikitnya jumlah pembiayaan yang diberikan tentunya menimbulkan risiko yang cukup rendah terhadap penyaluran pembiayaan tersebut, sehingga dana yang dipinjamkan ke masyarakat selaku nasabah pembiayaan sedikit yang bermasalah dengan catatan sesuai ceteris paribus.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa :

Estimasi model menunjukkan nilai R Square-nya sebesar $0,319$ yang mewakili nilai koefisien determinasi. Hal ini bermakna $31,90\%$ dari variasi variabel NPF mampu dijelaskan oleh variabel bebas dalam model ini. Sedangkan sisanya sebesar $68,10\%$ dijelaskan oleh sebab-sebab lain yang tidak masuk dalam model.

Model regresi pada variabel bebas secara simultan mempengaruhi variabel terikat, sehingga model regresi variabel bebas bisa dipakai untuk memprediksi variabel terikat.

Variabel Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel NPF; variabel BI Rate berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel NPF; variabel CAR tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel NPF; variabel FDR tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel NPF.

Bank Syariah perlu mengatur strategi agar tingkat pembiayaan bermasalahnya (NPF) tidak dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Sebab, risiko pembiayaan yang diterima Bank Syariah merupakan salah satu risiko usaha bank yang diakibatkan dari ketidakpastian dalam pengembaliannya atau yang diakibatkan dari tidak dilunasnya kembali pembiayaan yang diberikan pihak Bank Syariah kepada nasabah. Kepastiannya, Bank Syariah perlu dan harus tetap mengelola eksposur risiko pembiayaan pada tingkat yang memadai baik dalam faktor makroekonomi (Inflasi dan BI Rate) dan faktor mikroekonomi

(CAR dan FDR). Hal ini diperlukan karena dalam menjalankan bisnisnya, Bank Syariah sudah pasti berhubungan dengan risiko pembiayaan bermasalah. Oleh karenanya, jika NPF tidak dikelola secara efektif, maka akan mengganggu kelangsungan usaha Bank Syariah itu sendiri. Bank Indonesia mensyaratkan NPF minimal 5 persen. NPF pun merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan untuk mensinyalir adanya krisis pembiayaan bermasalah Bank Syariah.

Itulah sebabnya, *Pertama*. Harus ada kebijakan serta memintakan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk memberikan kebebasan atau berupa kompensasi kepada Bank Syariah terutama rasio keuangan. Rasio keuangan sendiri dimulai dengan laporan keuangan dasar. Perhitungan rasio keuangan akan berpola tiap tahunnya, sehingga tren perhitungan dapat dihitung apakah tiap tahunnya laporan keuangan Bank Syariah membaik atau memburuk. *Kedua*, Bank Syariah harus mampu mengukur dan melihat faktor paling dominan (faktor makroekonomi dan atau faktor mikroekonomi) yang mempengaruhi pembiayaan bermasalahnya. *Ketiga*, menyusun undang-undang Bank Syariah tersendiri. Hal ini amat penting agar Bank Syariah dapat menunjukkan ciri khasnya sendiri dari yang dimiliki Bank Konvensional karena Bank Syariah mulai diakui eksistensinya pada saat dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Bank yang menerapkan konsep bagi hasil. Meskipun tidak disebutkan secara jelas terkait prinsip syariahnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2006). *Managemen Resiko*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arifin, Zainul. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Azkia Publisher.
- Bank Indonesia. (2016). *Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia/OJK Januari 2006-Juli 2016*. Jakarta : Bank Indonesia. Melalui <http://www.bi.go.id>.
- Boediono. (1996). *Ekonomi Moneter*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.
- Dajan, Anton. (1986). *Pengantar Metode Statistik Jilid II*. Jakarta: LP3ES.
- Fahmi, Irham. (2016). *Pengantar Manajemen Keuangan: Teori dan Soal Jawab*. Bandung: Alfabeta.
- Firdaus, Rachmat. (2001). *Manajemen Dana Bank*. Bandung: STIE INABA.
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 21: Update PLS Regresi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hariyani, Iswi. (2010). *Kredit Macet*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hartono, Sri Redjeki. (2001). *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jusuf, Jopie. (2014). *Analisis Kredit Untuk Credit (Account) Officer*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. (2011). *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Kuncoro, Mudrajad. (2009). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.



- Kuncoro, Mudrajad dan Suhardjono. (2011). *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Machmud, Amir dan Rukmana. (2010). *Bank Syariah, Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Margaretha, Farah. (2007). *Manajemen Keuangan Bagi Industri Jasa*. Jakarta: Grasindo.
- Maski, Ghozali. (2007). *Transmisi Kebijakan Moneter: Kajian Teoretis dan Empiris*. Brawijaya: BPFE Universitas Brawijaya.
- Morissan. (2015). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad. (2004). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mulyono, Sri. (2017). *Statistika Untuk Ekonomi & Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Nopirin. (2009). *Ekonomi Moneter*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah tanggal 02 November 2011.
- Pemerintah Indonesia. (1998). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan tanggal 10 November 1998*. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah tanggal 16 Juli 2008*. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Siamat, Dahlan. (2005). *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: LPFE Universitas Indonesia.



Sinungan, Muchdarsyah. (1987). *Uang dan Bank*. Jakarta: Bina Aksara.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono dan Susanto, Agus. (2015). *Cara Mudah Belajar SPSS & Lisrel, Teori dan Aplikasi Untuk Analisis Data Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Wahyudi, Imam. (2013). *Manajemen Risiko Bank Islam*. Jakarta: Salemba Empat.



